

Nama : Indah Nur Aulia

NPM : 2213031047

Studi Kasus Ekonomi Industri

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Namun, selama puluhan tahun, Indonesia lebih banyak berperan sebagai eksportir bahan mentah dalam Global Value Chains (GVCs). Contohnya, Indonesia mengeksport bijih nikel ke negara lain, yang kemudian mengolahnya menjadi baterai kendaraan listrik dan menjualnya dengan nilai tambah yang tinggi.

Pemerintah Indonesia kini berusaha mengubah posisi dalam GVC, dari pemasok bahan mentah menjadi produsen barang setengah jadi atau jadi, lewat kebijakan hilirisasi industri, larangan ekspor bahan mentah, dan pemberian insentif investasi dalam pengolahan lokal. Namun, kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, baik dari pelaku industri dalam negeri maupun negara mitra dagang seperti Uni Eropa, yang bahkan menggugat Indonesia ke WTO.

Pertanyaan:

1. Analisis

Konteks:

a. Apa saja kelebihan dan kekurangan posisi Indonesia dalam GVC saat ini?

Jawaban:

Posisi Indonesia dalam Global Value Chains (GVCs) selama ini didominasi sebagai pemasok bahan mentah (upstream activities), khususnya pada komoditas berbasis sumber daya alam seperti nikel, batu bara, kelapa sawit, dan karet. Salah satu kelebihan utama dari posisi ini adalah kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya berupa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Peran ini memungkinkan Indonesia memperoleh devisa ekspor secara relatif cepat, menarik investasi di sektor ekstraktif, serta menciptakan lapangan kerja pada tahap awal rantai nilai.

Namun demikian, posisi tersebut juga memiliki kelemahan struktural yang signifikan. Aktivitas hulu dalam GVC umumnya menghasilkan nilai tambah yang rendah, sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, dan memiliki keterbatasan dalam mendorong transfer teknologi. Selain itu, dominasi ekspor bahan mentah membuat Indonesia memiliki daya tawar yang lemah dalam rantai nilai global, karena penguasaan terhadap desain produk, teknologi pengolahan, dan jaringan pemasaran internasional berada di tangan negara atau perusahaan lain yang beroperasi pada tahapan hilir.

b. Mengapa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai tambah yang optimal dalam GVC?

Jawaban:

Indonesia belum berhasil memperoleh nilai tambah optimal dalam GVC terutama disebabkan oleh beberapa faktor struktural. Pertama, keterbatasan kapasitas industri pengolahan domestik, baik dari sisi teknologi, infrastruktur, maupun skala ekonomi, menghambat pengembangan industri hilir. Kedua, ketergantungan pada investasi asing yang sebagian besar berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam, bukan pada pengembangan industri bernilai tambah tinggi dan inovasi.

Ketiga, lemahnya keterkaitan (linkages) antara sektor ekstraktif dan industri manufaktur domestik, sehingga manfaat ekonomi dari ekspor sumber daya alam tidak menyebar secara luas ke sektor lain. Keempat, kendala kualitas sumber daya manusia dan sistem inovasi nasional yang belum sepenuhnya mendukung industrial upgrading. Akibatnya, Indonesia terjebak dalam posisi sebagai pemasok input mentah tanpa kemampuan signifikan untuk naik ke segmen GVC dengan nilai tambah lebih tinggi.

2. Evaluasi

Kebijakan:

a. Apakah kebijakan hilirisasi seperti larangan ekspor bijih nikel dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC? Jelaskan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan geopolitik.

Jawaban:

Kebijakan hilirisasi, termasuk larangan ekspor bijih nikel, secara teoritis dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC dengan mendorong pergeseran dari aktivitas hulu ke aktivitas pengolahan dan manufaktur. Dari perspektif ekonomi, kebijakan ini berpotensi menciptakan nilai tambah domestik yang lebih tinggi, memperkuat basis industri nasional, membuka lapangan kerja, serta mendorong transfer teknologi melalui investasi di sektor pengolahan, seperti industri baterai kendaraan listrik.

Namun, dari sisi geopolitik dan perdagangan internasional, kebijakan ini menimbulkan tantangan serius. Larangan ekspor dianggap oleh sebagian negara mitra sebagai bentuk pembatasan perdagangan yang tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas dan aturan WTO. Sengketa dengan Uni Eropa menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi dapat memicu ketegangan geopolitik dan meningkatkan risiko retaliasi dagang. Dengan demikian, meskipun kebijakan hilirisasi memiliki potensi meningkatkan posisi Indonesia dalam GVC, keberhasilannya sangat bergantung pada desain kebijakan yang konsisten, kepastian hukum, serta kemampuan Indonesia mengelola tekanan eksternal.

b. Bagaimana dampak kebijakan ini terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang?

Jawaban:

Kebijakan hilirisasi berdampak langsung terhadap hubungan Indonesia dengan negara mitra dagang. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berupaya melindungi kepentingan industrinya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Di sisi lain, kebijakan tersebut memicu ketegangan diplomatik dan sengketa perdagangan, khususnya dengan negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan bahan mentah dari Indonesia.

Ketegangan ini berpotensi mengurangi kepercayaan investor, mempersulit akses pasar ekspor, serta meningkatkan ketidakpastian dalam hubungan perdagangan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan hilirisasi perlu diimbangi dengan diplomasi ekonomi yang aktif dan strategi komunikasi internasional yang efektif agar tidak merusak hubungan dagang strategis.

3. Sintesis dan Solusi:

Jika Anda adalah penasihat ekonomi pemerintah, strategi apa yang akan Anda usulkan agar Indonesia mendapatkan nilai tambah lebih besar dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional?

Jawaban:

Sebagai penasihat ekonomi pemerintah, strategi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam GVC tanpa merusak hubungan dagang internasional adalah pendekatan industrial upgrading yang gradual dan kooperatif. Pertama, hilirisasi perlu dikombinasikan dengan insentif investasi yang transparan dan non-diskriminatif, sehingga tetap sejalan dengan komitmen perdagangan internasional. Fokus diarahkan pada pengembangan industri pengolahan dan manufaktur bernilai tambah tinggi, bukan semata-mata pembatasan ekspor.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat ekosistem industri domestik, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, serta penguatan keterkaitan antara perusahaan multinasional dan industri lokal. Strategi ini memungkinkan Indonesia naik ke segmen GVC yang lebih bernilai tanpa menciptakan distorsi perdagangan yang berlebihan.

Ketiga, Indonesia perlu mengedepankan diplomasi ekonomi dan kerja sama internasional, misalnya melalui joint venture, perjanjian alih teknologi, dan pengembangan rantai pasok regional. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya memperoleh nilai tambah ekonomi yang lebih besar, tetapi juga mempertahankan hubungan dagang yang konstruktif dan berkelanjutan dengan mitra internasional.